

Profil:

Tugas Undercover Polisi Memperhatikan

Wawancara
dengan Kapolri Jenderal (Pol) Drs. KPH
Rusdihardjo

"Saya ini orang Jawa asli, tapi saya tidak bisa terima perlakuan Brimob itu," Ungkap Jenderal (Pol) Drs. KPH Rusdihardjo mengenang peristiwa Tawangmangu yang terjadi 36 tahun lalu, tepatnya bulan Juli 1964. Waktu itu ia dan kawan-kawannya dipinta oleh tiga orang Brimob yang ingin menumpang. Namun karena Chevrolet tahun 1960 berplat nomor F itu sudah penuh, mereka menolak permintaan Brimob tersebut. Karena tidak terima si Brimob mengajak berkelahi. Persoalan selesai setelah salah satu dari tujuh pemuda yang paling Jawa itu secara santun meminta maaf. Peristiwa Tawangmangu Juli 1964 itu menjadi titik kritis dalam jalan hidup cucu Paku Buwono X asal Solo ini. "*I want to be a good police*, justru karena pengalaman Tawangmangu itu. Saya ingin memperbaiki keadaan," begitulah tekad pria kelahiran Solo 7 Juli 1945 ketika diterima di Akademi Kepolisian (Akp) 1964 ini. Berikut wawancara dengan Kapolri yang sumbernya kami comot dari Kompas, edisi Minggu 21 Mei 2000, dengan editing seperlunya, tentu saja setelah meminta izin kepada pihak redaksi.

Program utama setelah jadi Kapolri?

Saya ingin polisi kembali ke identitasnya lagi. *We have to rediscover our identity*.

Maksudnya?

Polisi harus melindungi rakyat. Ia harus menjadi *public servant*. Sesungguhnya kita ini *sipil yang berseragam*. Seharian-hari yang kita hadapi adalah warga negara yang juga harus dilindungi martabatnya. Pemahaman inilah yang harus ditanamkan.

Mulai dari mana?

Dari struktur, dari pendidikan, dan dari masyarakat sendiri. Soal struktur misalnya, yang paling mendasar adalah memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan. Pertahanan itu menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan keamanan menghadapi warga negara sendiri yang harus dilindungi martabatnya. Dua fungsi itu sangat berbeda. Dulu digabungkan terus, maka ada hankam. Penggabungan itu membuat tidak ada lagi batas yang jelas antara musuh dari luar dan dengan warga negara sendiri.

Di negara lain dua hal itu terpisah. *Minister of Defence* titik. Kita ini sering membuat penghalalan sendiri. Ini yang mengganggu profesionalisme.

Maksudnya mengacaukan profesionalisme?

Ya, lebih baik merencanakan profesionalisme.

Bagaimana dengan pendidikan?

Perubahan sudah dilakukan perlahan-lahan. Kita tidak bisa radikal secepat membalik tangan. Sejak tahun lalu perubahan itu sudah terjadi. Hal-hal kemiliteran dalam kurikulum, seperti latihan perang gabungan misalnya, sudah kita kurangi. Bukan cuma itu, hal-hal yang bersifat militeristik dalam praktek pendidikan juga sudah dihilangkan.

Contohnya?

Hubungan antara senior dan junior, misalnya, antara instruktur dan muridnya. Dulu kaku, main gampar, main pukul. Itu kita kurangi. Dulu, yang namanya junior kalau disuruh minum dari sepatu si senior, itu pasti harus dilakukan. Sekarang praktek itu tidak boleh.

Orientasi kurikulum juga sudah berubah. Contoh dalam pelajaran menembak misalnya, kita kan pakai gambar orang, siluet. Dulu, nomor satu yang harus ditembak adalah jantung dan kepala. Nilainya sepuluh. Ini cara militer. Sekarang lain, setelah lepas dari ABRI, yang nomor satu itu tangan dan kaki.

Berarti penyatuan polisi ke ABRI (melalui SK Presiden RI No. 132 tahun 1967) membuat kacau?

Iniilah akibatnya kalau begitu saja menyatukan antara pertahanan dan keamanan. Subyeknya berbeda, metodenya berbeda, obyeknya berbeda. Selama ini dipaksakan untuk satu. Memang penyatuan itu bukan ide yang jelek. Situasi waktu itu (1967) mungkin membutuhkannya. Tetapi situasi semacam itu tidak boleh diteruskan.

Kembali ke soal pendidikan, bagaimana alur rekrutmen dan jenjang karir polisi mendatang?

Ketika kita diintegrasikan dengan ABRI maka *gate* masuk ke polisi itu ada empat: tamtama, bintang, akademi dan sarjana. Ini kita kurangi. Jalur tamtama kita hapus. Nanti hanya satu pintu saja

Namanya jalur sersan-bintang, Sekolah Calon Bintang (Secaba). Nanti kalau

mau masuk Akpol harus ke situ dulu, seperti di Inggris. Hanya beberapa persen dari lulusan Secaba yang memenuhi syarat saja yang bisa masuk akademi. Target saya (dalam masa peralihan ini), 40 persen yang masuk Akpol harus berasal dari Secaba. Sekarang *kan nggak begitu*. Dari SMA, masuk Akpol, dan begitu lulus jadi letnan. Mereka *nggak* pernah di lapangan, *nggak* pernah menyidik. Akibatnya ya *kayak begini*.

Maksudnya?

Dalam profesi polisi, ada kaitan erat antara tingkat kepangkatan dengan tingkat kedewasaan. Polisi itu kan berhadapan dengan dengan warga negara yang harus dilindungi martabatnya. Ia berhadapan dengan masalah *law enforcement*. Untuk itu dibutuhkan bukan cuma profesionalisme, tapi juga kedewasaan sikap. Tanpa kedewasaan, profesionalisme polisi akan turun.

Tamatan Akpol misalnya. Lulus jadi letnan padahal usianya paling-paling baru 22 tahun. Tak pernah ke lapangan, dapat jabatan, punya anak buah, naik Cheeroke, lalu karena pengaruh pergaulan, merasa berada di atas. Ada kesenjangan antara kedewasaan dan jabatan. Ini yang membuat repot.

Bukankah letnan-letnan yang masuk melalui Secaba juga begitu?

Beda. Yang masuk Secaba itu *clear*. Mereka itu orang biasa yang ingin bekerja. Sementara yang masuk Akpol, banyak yang titipan. Di lapangan, kadang ada bentrok. Mereka (yang masuk melalui Secaba) ini tak mau tunduk pada letnan Akpol. Tak tahu lapangan, sudah perintah-perintah, kata mereka. Ini masuk akal.

Sama-sama lulus SMA, yang satu setengah tahun jadi sersan, sedang yang lain tiga tahun sudah jadi letnan. Padahal kalau sersan-sersan ini ingin jadi letnan, dibutuhkan waktu 12 tahun. Ini *nggak* adil. Dari aspek profesional pun tak baik. Satu dari Akpol dan satu naik jadi letnan, maka jelas saya memilih yang jadi sersan. Ia sudah matang, sudah pengalaman. Di luar negeri juga begitu. Tidak ada, jadi polisi tahu-tahu jadi inspektur. *Constabel* (setingkat di bawah sersan) dulu, *sergeant* dulu.

Karir Rusdihardjo memang tidak dimulai dari sersan. Dengan pangkat Letnan Dua, lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Angkatan XI ini, pertama kali bertugas sebagai reserse di Kowil 73 (sekarang disebut Polres) Jakarta Barat (1968-1971). Bidang reserse ini dijalani lagi saat di Polda Kalimantan Barat (1974-1979), yaitu sebagai Kabag Reserse/Intel.

Setelah lulus Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang, tahun 1979, ia menjabat sebagai Kasubdit Reserse Narkotika selama 10 tahun (1979-1989). Pada zaman itu ia ikut membongkar jaringan narkotika internasional jalur Jakarta-Bangkok-Los Angeles-Rio de Janeiro-Sao Paulo tahun 1985.

Tahun 1989, ia menjadi Kapolwil DIY. Tiga tahun setelah lulus Lemhanas, Rusdihardjo memimpin Kontingen Polri Garuda XII Civil Police yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Kamboja (1992-1993). Pulang dari situ, ia diangkat menjadi Direktur Reserse Mabes Polri. Jabatan terakhir yang disandanginya sebelum menjadi Kapolri adalah Kepala Staf dan Pimpinan Polri.

Istrinya, Ni Made Darsini adalah teman sesama polisi ketika di PTIK. Pasangan ini dikaruniai tiga anak. Yang tertua, Laksmi Christina (28) – lulusan arsitektur UGM – baru saja menyelesaikan S2 Urban Development di Boston, AS. Yang kedua, Rudi Wicaksono (25) – lulusan ekonomi dari Australia – kini sedang melakukan orientasi di Amerika. Sementara yang terkecil, Anita Puspitasari (16) masih duduk di sebuah SMU di Jakarta.

Bagi Rusdihardjo, karir polisi itu sangat menantang. Tugas yang paling berat – terutama juga untuk istri – adalah tugas *undercover* (penyusupan sambil menyamar).

“Saat itu kita berada di tengah lawan. Kadang-kadang di negara lain, Thailand, Brazil. Rekan sendiri tidak bisa menghubungi, apalagi keluarga. Betul-betul sendirian. Dan Anda tahu, penjahat itu paling sakit hati kalau tertangkapnya terjebak. Pembalasan mereka bisa sangat kejam dan sadis,” begitu cerita Rusdihardjo.

Tentang *undercover* ini, ia memang bisa cerita banyak. Ia bahkan menilai, tugas semacam itu lebih berat daripada perang frontal, dar-der-dor. “Pada perang semacam itu, kan ada anak buah. Kita juga bisa bersembunyi di balik pohon, di balik tempat tidur,” ungkapnyanya. Masalah *undercover* ini juga menjadi keprihatinannya.

Mengapa prihatin soal undercover?

Sekarang ini polisi tampaknya kurang banyak melakukan tugas *undercover*, khususnya dalam menangani masalah narkoba. Mungkin inilah penyebab masyarakat mencurigai polisi sebagai penjual narkoba. Polisi sering mau enak-nak saja. Main razia, penumpang bus digeledah, lagi enak-enak disco digerebeg. Itu cara-cara yang masih tradisional. Tapi lalu apa hasilnya?

Waktu penggrebegan di diskotik misalnya, semua barang bukti segera dibuang ke lantai. Akibatnya, tidak jelas lagi hubungan antara barang bukti dengan orangnya. Akhirnya yang dibuat, barang bukti dikumpulkan jadi satu, tersangkanya jadi satu. Tapi tanpa kaitan antara barang bukti dengan tersangka, tidak bisa dibuktikan apa-apa. Tanpa ada bukti bahwa barang itu ada padanya, seseorang tidak bisa dibawa ke pengadilan. Tersangka itu harus jelas dulu.

Terkait dengan pemahaman masyarakat soal tugas polisi?

Betul. Selain oleh struktur dan pengadilan, sosok tugas dan figur polisi juga ditentukan oleh pemahaman masyarakat. Hubungan polisi dengan masyarakat itu bisa diistilahkan *like father like son*. Begitu masyarakatnya, begitu pula polisinya.

Contohnya soal korupsi. Suatu ketika, saya siapkan polisi yang *brand new*. Saya terjunkan di masyarakat. Ia menilang tetapi masyarakat minta damai. Daripada repot-repot, kata mereka. Nah, bukankah yang *ngajari* korupsi itu masyarakat sendiri.

Contoh lain?

Yang ekstrem adalah kasus penganiayaan terhadap tujuh polisi oleh sekitar 30 tentara di Karawang (Kompas, 28/4). Kasus tersebut terkait dengan tugas

polisi sebagai penyidik. Begini. Kita ini adalah negara demokrasi. Ada supremasi hukum. Siapa pun yang melakukan tindak pidana, ia harus disidik.

Pada tahap awal, polisilah yang menjadi penyidik. Bahwa kemudian pada tahap selanjutnya – khususnya menyangkut kasus Karawang – ternyata pelakunya adalah anggota ABRI, maka penyidikan lanjutan diserahkan pada POM ABRI. Tetapi sekali lagi, pada tahap awal, polisilah yang menyidik.

Apalagi kalau itu menyangkut penyidikan sebuah tindak pidana, faktor waktu menjadi sangat penting. Kalau terlambat mengambil tindakan, maka barang bukti, tersangka, saksi, dan lain-lainnya sudah berubah atau hilang. Hitungannya menit.

Peristiwa di Karawang adalah serangan terhadap penyidik, atau lebih tepatnya serangan terhadap aparat yang berwenang untuk menyidik. Ini tentu sangat disayangkan. Mungkin orang itu tidak mengerti hukum, atau mungkin mengerti tetapi kemudian justru melecehkan supremasi hukum.

Kasus Karawang itu mengecewakan. Kejahatan *kan* harus diperangi. *Crime does not pay*, itu di mana-mana. Dan, *we fight the crime, not the criminal*.

Jadi bukan anggota TNI pun paham soal ini?

Begini. Polisi tingkat awal blik ini. Secara uni-siapa pun yang hatan harus bisa. Ketentuan di sini nang menyidik POM ABRI, sebeduran dibanding termasuk yang terbelakang sekalipun.

Barangkali di ASEAN ini hanya tinggal Myanmar dan Indonesia saja yang memiliki ketentuan polisi tidak bisa menyidik militer. Itu menunjukkan, betapa lingkup polisi sangat terbatas

cuma masyarakat, banyak yang belum

sebagai penyidik hanya ada di repu-versal, di dunia ini, melakukan keja-disidik oleh polisi. bahwa yang berwe-anggota TNI adalah tulnya suatu kemun-negara-negara lain

Di Kamboja misalnya, polisi bisa menyidik anggota militer. Barangkali di ASEAN ini hanya tinggal Myanmar dan Indonesia saja yang memiliki ketentuan polisi tidak bisa menyidik militer. Itu menunjukkan, betapa lingkup polisi sangat terbatas.

Optimis membangun citra baru polisi?

Tentu. Saya punya sikap. Pada saat orang ragu, saya tidak ragu-ragu. Pada saat orang takut, saya berani. Contohnya, ketika ada kasus kerusuhan di Lombok 17-18 Januari lalu. Waktu itu siapapun ragu untuk *ngomong*. Saya terang-terangan saja menyebut itu soal yang terkait dengan SARA.

Lalu soal Komando Jihad. Tidak ada yang merespons. *Kok* semua cuma terbelalak. Saya *ngomong* dan kemudian bertindak. Nomor satu membuat mereka mengerti. Dan syukur mereka mengerti. Saya sportif. Saya kirim mereka penghargaan. Terima kasih pada sikap mereka yang menghormati supremasi hukum, saya bangga pada mereka. Yang sama ketika dilakukan penyidikan

terhadap Yorris Raweyal (pimpinan Pemuda Pancasila). Katanya, kalau Yorris diperiksa, situasi akan kacau. Tapi bukankah penyidikan itu adalah bagian dari upaya penegakan hukum.

Ini merupakan amanat seluruh rakyat. Rakyatlah yang mendesak. Kalau penyidikan ini diganggu, ya mereka akan berhadapan dengan rakyat. Syukur, semuanya beres. Ini pertanda bahwa orang mulai menghormati supremasi hukum, bukan polisinya.

H. Witdarmono, Pewawancara

Sumber: *Harian Kompas*, 21 Mei 2000.

JURNAL POLISI INDONESIA

Mengucapkan

Selamat Atas Dies Natalis PTIK ke-54

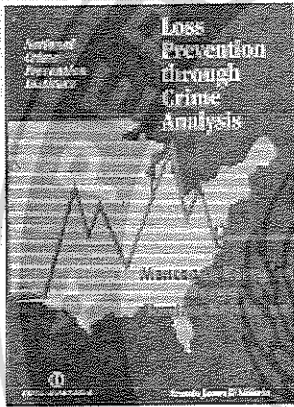
17 Juni 1946

17 Juni 2000

BAKTI

Berita Buku

Judul buku : Loss Prevention through Crime Analysis (Mencegah Kerugian dengan Analisa Kejahatan)
Pengarang : Francis James D'Addario
Penerbit : Cipta Manunggal, 1999
Tebal : 106, xii

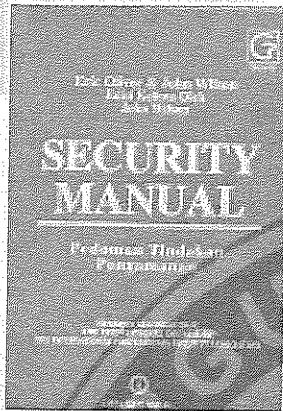


Buku kecil sajian Francis James D'addario ini merupakan satu dari banyak buku yang memberikan gambaran analisa keamanan. Buku ini ditawarkan kepada pengamanan industri atau usaha dengan tesis bahwa betapa kerugian satu perusahaan dapat dikurangi apabila dilakukan analisa kejahatan dengan baik dan seksama. Bahkan dengan analisa yang hitungannya cukup eksak. Mereka menjadi pelapis kedua di samping tugas kepolisian resmi yang mengalami kesulitan teknis untuk menjangkau keamanan internal suatu perusahaan. Buku ini merupakan seni penyampaian pemikiran pencegahan kerugian finansial. Berbagai metode kuantitatif untuk menghadang model kejahatan yang mengurangi dampak keuntungan dibahas secara

singkat namun padat dan efektif. Dengan bekal sebagai seorang dalam seluk beluk perdagangan retail, pengarang buku ini membedah berbagai kasus kejahatan yang merugikan perusahaan. Bagi kita di Indonesia yang sedang melebur diri dalam pola perdagangan dan jasa sebagaimana perusahaan-perusahaan skala dunia lainnya, buku ini memberikan bekal konkret mengenai bagaimana modus beraneka kejahatan itu terhampar, tapi sekaligus memberikan solusi pencegahannya. Namun diperlukan juga adaptasi-adaptasi tertentu untuk mengkontekskan dengan permasalahan kejahatan di Indonesia.

Judul buku : Security Manual (Pedoman Tindakan Pengamanan)
Penulis : Eric Oliver dan John Wilson
Penerbit : Cipta Manunggal, 2000
Tebal : 241, xxv

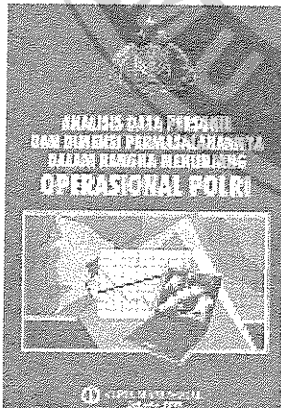
Di negara demokratis macam di Amerika Serikat ataupun Eropa, pengembangan Polisi Masyarakat atau Polisi Swasta sangatlah pesat. Pelapis keamanan ini sangat diperlukan karena tidak mencukupinya petugas keamanan (Polisi) negara. Mereka difungsikan dalam perusahaan-perusahaan sampai pada fenomena



pemfungsian di kawasan bisnis baru seperti Mall (pusat pertokoan), hotel, maupun kawasan yang sebelumnya tidak begitu diperhatikan seperti rumah sakit. Ini semua untuk mencegah adanya kejahatan dari pencurian, vandalisme hingga hooliganisme. Karena itulah *security concern* yang semakin marak harus diimbangi oleh peningkatan ketrampilan — profesionalisme dan sikap yang elegan — jujur dan rela berkorban.

Buku ini aslinya terformat dalam bentuk buku saku agar mudah dibawa, namun ketika diindonesiakan berubah menjadi buku ukuran relatif besar dan tebal. Namun terlepas dari kekurangan bentuk fisiknya, buku ini menjelaskan secara sistematis mengenai petunjuk-petunjuk praktis saat para petugas keamanan swasta (Satpam) seperti tugas patroli, prosedur penahanan oleh satpam, prosedur peradilan, pencegahan kebakaran, pencegahan kecelakaan, pengamanan uang, dan sebagainya. Dalam hal ini, Polri bertindak sebagai pengarah utama dan pemberi *grand design* dan *grand strategy*-nya. Apabila ini diabaikan, bukan tak mungkin bahwa pengamanan swasta akan menyulitkan dan menjadi bumerang Polri. Juga bagi pihak pemberi pelayanan swasta dalam negeri, peningkatan layanan produk keamanan merupakan suatu keharusan agar pencari jasa layanan tidak lari kepada pihak pelayanan jasa keamanan luar negeri yang lebih profesional.

Judul buku : Analisis Data Personil dan Dimensi Permasalahannya dalam Rangka Menunjang Operasional Polri.
Penyunting : Jendralpol (Purn.) Drs. Kunarto, MBA
Penerbit : Cipta Manunggal, 1999 (cetakan ke-2)
Tebal : 92, xiv



Buku yang disunting oleh Jendralpol (purn) Kunarto ini, sebagaimana diakuinya, berasal dari buah pikir anak buahnya Brigjen Daan Sabadan yang kala itu menjabat sebagai direktur personel Polri. Pada tahun 1999 penyunting menerbitkan ulang, dengan tekanan pada perbaikan kualitas fisik buku, karena dirasakan urgensinya bagi acuan pengembangan personel Polri. Hampir 75 persen dari buku ini dihiasi oleh tabel dan berbagai matriks, statistik dan perhitungan matematis yang mengukur dan mengurai persoalan di seputar pembinaan personel Polri. Bisa dikatakan bahwa buku ini merupakan buku yang berharga dan model rintisan bagi upaya memadukan visi personel dan misi operasional

Polri. Di lembaran lampiran juga ditunjukkan contoh model penghitungan kegiatan personel dalam rangka memimpin kesatuan pelaksanaan operasi (Polres, Polwil, dll) untuk melihat nilai produktivitas pimpinan.